



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 31 TAHUN 2011

### TENTANG

### PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa untuk mendorong penggunaan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan pupuk an-organik perlu dilakukan penurunan HET pupuk organik bersubsidi, sehingga perlu mengubah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2011.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = Rp. 1.600,- per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;

2. Lampiran 1, 2, dan 3, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, 2, dan 3, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan lain dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 dinyatakan masih tetap berlaku.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 6 April 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 13 Mei 2011

**Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,**



**GATOT PUJO NUGROHO**

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011  
 MENURUT SUB SEKTOR DAN JENIS PUPUK**

(Ton)

NO.	SUB SEKTOR	SEMULA					MENJADI				
		UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Tanaman Pangan dan Hortikultura	175.895	23.144	34.747	108.578	51.952	175.895	23.144	34.747	108.578	41.666
2.	Perkebunan	52.290	11.137	23.116	40.922	15.445	52.290	11.137	23.116	40.922	12.387
3.	Peternakan	700	48	137	0	206	700	48	137	0	165
4.	Perikanan Budidaya	8.115	2.671	0	0	2.397	8.115	2.671	0	0	1.922
<b>JUMLAH</b>		<b>237.000</b>	<b>37.000</b>	<b>58.000</b>	<b>149.500</b>	<b>70.000</b>	<b>237.000</b>	<b>37.000</b>	<b>58.000</b>	<b>149.500</b>	<b>56.140</b>

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



GATOT PUJO NUGROHO

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011  
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KABUPATEN / KOTA

(Ton)

NO.	KABUPATEN/ KOTA	SEMULA					MENJADI				
		UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK	UREA	SP - 36	ZA	NPK	ORGANIK
1.	Medan	1.664	152	167	452	360	1.664	152	167	452	289
2.	Binjai	1.456	341	604	2.758	308	1.456	341	604	2.758	247
3.	Tebing Tinggi	989	208	281	649	144	989	208	281	649	115
4.	Pematang Siantar	2.010	844	958	2.024	411	2.010	844	958	2.024	330
5.	Tanjung Balai	774	42	103	188	76	774	42	103	188	61
6.	Nias Barat	1.072	181	175	706	383	1.072	181	175	706	307
7.	Padangsidempuan	1.579	714	587	723	348	1.579	714	587	723	279
8.	Deli Serdang	20.562	2.959	3.776	11.823	6.247	20.562	2.959	3.776	11.823	5.010
9.	Langkat	18.343	3.205	2.270	7.490	5.059	18.343	3.205	2.270	7.490	4.057
10.	Simalungun	30.443	4.231	4.083	23.462	9.447	30.443	4.231	4.083	23.462	7.576
11.	Karo	22.425	5.629	9.640	25.361	6.984	22.425	5.629	9.640	25.361	5.601
12.	Dairi	12.435	1.625	3.068	7.786	4.248	12.435	1.625	3.068	7.786	3.407
13.	Asahan	8.437	1.138	3.770	4.394	3.138	8.437	1.138	3.770	4.394	2.517
14.	Labuhan Batu	8.290	1.869	1.172	4.010	1.320	8.290	1.869	1.172	4.010	1.059
15.	Tapanuli Selatan	8.781	844	3.267	3.832	3.348	8.781	844	3.267	3.832	2.685
16.	Tapanuli Tengah	4.110	447	887	1.219	801	4.110	447	887	1.219	642
17.	Tapanuli Utara	8.218	1.837	1.905	4.042	2.876	8.218	1.837	1.905	4.042	2.307
18.	Nias	1.764	456	176	423	382	1.764	456	176	423	306
19.	Mandailing Natal	10.147	798	610	4.264	1.892	10.147	798	610	4.264	1.517
20.	Toba Samosir	5.595	858	1.284	3.597	1.431	5.595	858	1.284	3.597	1.148
21.	Serdang Bedagai	18.510	2.592	5.146	10.900	5.629	18.510	2.592	5.146	10.900	4.514
22.	Humbang Hasundutan	4.479	530	1.492	1.692	1.142	4.479	530	1.492	1.692	916
23.	Pakpak Bharat	2.202	304	984	950	555	2.202	304	984	950	445
24.	Samosir	3.846	162	655	997	883	3.846	162	655	997	708
25.	Nias Selatan	1.962	326	468	1.143	727	1.962	326	468	1.143	583
26.	Batubara	8.806	973	3.419	6.923	4.943	8.806	973	3.419	6.923	3.964
27.	Padang Lawas	6.674	753	2.541	5.674	1.958	6.674	753	2.541	5.674	1.570
28.	Padang Lawas Utara	6.612	1.638	2.357	5.361	1.948	6.612	1.638	2.357	5.361	1.562
29.	Labuhan Batu Selatan	4.105	455	714	891	826	4.105	455	714	891	662
30.	Labuhan Batu Utara	8.820	695	1.163	5.081	1.643	8.820	695	1.163	5.081	1.318
31.	Gunung Sitoli	247	26	31	0	81	247	26	31	-	65
32.	Nias Utara	1.643	167	247	685	462	1.643	167	247	685	371
<b>JUMLAH</b>		<b>237.000</b>	<b>37.000</b>	<b>58.000</b>	<b>149.500</b>	<b>70.000</b>	<b>237.000</b>	<b>37.000</b>	<b>58.000</b>	<b>149.500</b>	<b>56.140</b>

Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

  
 GATOT PUJO NUGROHO

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2011 MENURUT JENIS PUPUK, SUB SEKTOR DAN SEBARAN BULAN

**A. PUPUK UREA :** (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	175.895	10.507	11.609	11.209	15.660	18.276	14.009	9.835	12.444	19.251	19.802	19.871	13.421
2. Perkebunan	52.290	3.819	3.839	4.459	3.248	3.765	4.273	4.175	4.044	4.356	4.162	4.991	7.159
3. Peternakan	700	68	64	58	51	49	45	55	56	54	61	67	72
4. Perikanan Budidaya	8.115	956	768	573	447	573	480	575	541	613	769	828	992
<b>JUMLAH</b>	<b>237.000</b>	<b>15.350</b>	<b>16.280</b>	<b>16.299</b>	<b>19.406</b>	<b>22.663</b>	<b>18.807</b>	<b>14.640</b>	<b>17.085</b>	<b>24.274</b>	<b>24.794</b>	<b>25.757</b>	<b>21.644</b>

**B. PUPUK SP - 36 :** (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	23.144	1.452	1.516	1.721	2.005	2.197	1.364	1.121	1.678	2.769	2.575	2.710	2.036
2. Perkebunan	11.137	784	855	898	957	911	956	895	952	929	1.122	948	930
3. Peternakan	48	4	4	3	1	3	3	3	5	5	6	6	5
4. Perikanan Budidaya	2.671	306	240	176	134	176	164	199	164	211	266	286	349
<b>JUMLAH</b>	<b>37.000</b>	<b>2.546</b>	<b>2.615</b>	<b>2.798</b>	<b>3.097</b>	<b>3.287</b>	<b>2.487</b>	<b>2.218</b>	<b>2.799</b>	<b>3.914</b>	<b>3.969</b>	<b>3.950</b>	<b>3.320</b>

**C. PUPUK ZA :** (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	34.747	2.088	2.124	2.139	3.423	3.299	2.828	2.565	2.333	3.296	4.049	3.974	2.628
2. Perkebunan	23.116	1.470	1.772	2.202	2.287	1.765	1.646	1.542	1.714	1.767	2.120	2.515	2.316
3. Peternakan	137	15	8	9	11	12	12	16	17	8	9	11	9
<b>JUMLAH</b>	<b>58.000</b>	<b>3.574</b>	<b>3.904</b>	<b>4.350</b>	<b>5.721</b>	<b>5.076</b>	<b>4.486</b>	<b>4.123</b>	<b>4.064</b>	<b>5.071</b>	<b>6.178</b>	<b>6.500</b>	<b>4.953</b>

**D. PUPUK NPK :** (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	108.578	5.876	5.642	7.224	11.112	9.332	8.024	6.996	10.104	11.571	12.415	10.327	9.955
2. Perkebunan	40.922	2.873	3.482	3.482	3.249	3.032	3.633	3.298	3.494	2.989	3.622	4.049	3.719
<b>JUMLAH</b>	<b>149.500</b>	<b>8.749</b>	<b>9.124</b>	<b>10.706</b>	<b>14.361</b>	<b>12.364</b>	<b>11.657</b>	<b>10.294</b>	<b>13.598</b>	<b>14.560</b>	<b>16.037</b>	<b>14.376</b>	<b>13.674</b>

**E. PUPUK ORGANIK :** (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	41.666	2.829	2.734	2.981	3.471	3.915	2.781	2.763	2.963	4.400	5.073	4.964	2.791
2. Perkebunan	12.387	613	1.155	1.014	975	844	928	1.404	1.027	968	1.397	1.011	1.051
3. Peternakan	165	2	6	7	24	23	24	25	24	24	2	2	2
4. Perikanan Budidaya	1.922	225	180	136	105	136	112	133	128	144	182	202	238
<b>JUMLAH</b>	<b>56.140</b>	<b>3.669</b>	<b>4.075</b>	<b>4.138</b>	<b>4.575</b>	<b>4.918</b>	<b>3.846</b>	<b>4.325</b>	<b>4.142</b>	<b>5.536</b>	<b>6.654</b>	<b>6.180</b>	<b>4.082</b>

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



GATOT PUJO NUGROHO